KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Janji Tetap Produktif Semasa Kampanye
Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

DPR Janji Tetap Produktif Semasa Kampanye

JAKARTA, KOMPAS — DPR berkomitmen kinerja mereka tidak akan terganggu dengan kian masifnya kegiatan kampanye di sisa kurang dari sebulan jelang hari pemungutan suara Pemilu 2024. Untuk lebih memastikan hal itu, setiap fraksi yang ada di DPR diminta mengawasi kehadiran anggota mereka.

"Tahun 2024 merupakan tahun terakhir tugas DPR periode 2019-2024. Menjadi komitmen bagi kita semua menunaikan tugas konstitusi untuk meninggalkan *legacy* yang semakin baik dalam menjalankan kedaulatan rakyat," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2023-2024 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Masa Sidang III Tahun 2023-2024 yang berlangsung 16 Januari hingga 6 Februari berjalan di tengah tahapan kampanye Pemilu 2024. Kurang dari sebulan jelang waktu pemungutan suara pada 14 Februari, intensitas kampanye partai politik (parpol), termasuk para calon anggota legislatif (caleg) yang kini masih menjabat anggota DPR, pun bakal kian tinggi. Sebanyak 521 dari 575 anggota DPR tercatat sebagai caleg.

"Walaupun demikian, anggota DPR akan tetap berkomitmen menjalankan tugas-tugas konstitusional secara efektif, khususnya merespons hal-hal yang sangat mendesak dan strategis," ujar politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR melanjutkan pembahasan 19 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih pada tahap pembicaraan tingkat I. Selain itu, terdapat 34 RUU yang akan memasuki pembicaraan tingkat I.

"Kompleksitas dalam membentuk undang-undang sangat ditentukan oleh seberapa banyak perbedaan perspektif dan kepentingan antarpihak yang akan diatur dalam undang-undang tersebut. DPR bersama pemerintah dalam membentuk UU selalu mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan negara dan memperhatikan aspirasi publik," ucapnya.

RUU Desa

Selain itu, DPR juga tidak menutup kemungkinan membahas RUU yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023, salah satunya RUU Desa.

Dalam rapat paripurna, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan interupsi untuk mengingatkan para pimpinan DPR agar memberikan kejelasan terhadap pembahasan RUU Desa. Meski sudah disepakati menjadi RUU usul inisiatif DPR pada masa sidang sebelumnya, belum ada kejelasan waktu pembahasan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa para aparatur desa sangat gencar mendorong pembahasan RUU Desa. Akan tetapi, DPR tidak mau pembahasan RUU tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu. "Karena di tahun politik, kita tidak mau bahwa revisi UU Desa itu kemudian menguntungkan pada satu atau dua parpol saja di parlemen ini," ujarnya.

Berangkat dari hal itu, asosiasi kepala desa dipersilakan meyakinkan semua fraksi di DPR tentang urgensi pembahasan RUU Desa. Ia tidak ingin pembahasan urgensi itu hanya pada fraksi tertentu.

Pada Senin (15/1), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) merilis hasil riset yang menunjukkan penurunan kinerja DPR, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan selama Masa Sidang II Tahun 2023-2024 (*Kompas*, 16/1/2024). Masa sidang dimaksud pun berlangsung di tengah tahapan kampanye pemilu. Catatan Formappi, salah satunya, DPR hanya mengesahkan satu RUU menjadi UU. Padahal, pada Masa Sidang I, ada dua RUU yang disahkan. Sepanjang 2023, kinerja legislasi DPR hanya mencapai 13,5 persen dari total 37 RUU yang ada di Prolegnas Prioritas Tahun 2023.



Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Rapat yang dihadiri 237 orang dari total 575 anggota tersebut digelar setelah masa reses DPR pada 6 Desember 2023 dan menjadi pembuka masa sidang III yang akan berlangsung hingga 7 Februari 2024.

Soal kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna pun jadi sorotan. "Secara rata-rata, selama Masa Sidang II hanya 293 orang atau 50,96 persen anggota (DPR) yang menghadiri rapat paripurna," ujar peneliti Formappi, Y Taryono.

Memasuki Masa Sidang III, kehadiran anggota DPR pada rapat paripurna juga tak jauh berbeda. Dasco menjelaskan, mengacu daftar hadir rapat paripurna, terdapat 237 anggota DPR yang menandatangani daftar hadir. Sebanyak 54 anggota izin, tetapi masuk kategori hadir. "Dengan demikian, kuorum telah tercapai," katanya.

Puan tak memungkiri adanya persoalan kehadiran. Ia pun mengakui, hal itu merupakan salah satu tanggung jawab pimpinan DPR untuk bisa terus mendorong ketertiban anggota DPR. "Tentu saja nanti kami akan meminta seluruh fraksi untuk bisa mengawal dan bergiliran meminta seluruh anggotanya hadir di Gedung DPR dalam pembahasan hal-hal yang harus dibahas," katanya.

Namun, menurut Puan, ketidakhadiran anggota DPR tak selamanya mencerminkan bahwa mereka tak bekerja. Wakil rakyat juga berkewajiban turun ke daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat. (NIA/BOW)